



## **BUPATI KONAWE SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 5 Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
6. SKPD adalah unit kerja yang berada dalam lingkup Kabupaten Konawe Selatan
7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM.
12. Pelayanan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah yang meliputi seluruh bidang pelayanan masyarakat.
13. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) .
14. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
15. Unit Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Adalah SKPD Kabupaten Konawe selatan yang memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Bupati.

**BAB II**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

**Pasal 2**

**Bagian Kesatu**

**Maksud, Tujuan dan Fungsi**

**Paragraf 1**

**Maksud**

Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang membidangi pelayanan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Konawe Selatan.

**Paragraf 2**

**Tujuan**

Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Konawe Selatan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan pengawasan kepada SKPD terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

**Paragraf 3**

**Fungsi**

Fungsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai:

- a. Alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah;
- b. Acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. Pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. Acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. Acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan;
- f. Pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
- g. Pedoman penyusunan program-program tahunan;
- h. Acuan penentuan standar pelayanan kinerja pelayanan.

**Bagian Kedua**  
**Standar Pelayanan Minimal**  
**Paragraf satu**

Urusan paling mendasar dalam Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan termaktub dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2**

Urusan yang paling mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, pencapaian setiap tahunnya tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**BAB III**  
**PENGORGANISASIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**  
**Pasal 3**

1. Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD teknis;
3. Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM oleh tenaga ahli dan terampil sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**  
**Pasal 4**

1. Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan di lingkungan Kabupaten Konawe Selatan;
2. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD);
4. Bappeda melakukan mapping kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional;
5. SKPD terkait menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya;
6. SKPD terkait bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain;
7. Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada masing masing indikator, ditetapkan pencapaian tiap tahunan selama 5 (lima) tahun, dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
8. Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas terdapat dalam Lampiran Bupati ini yang merupakan

**BAB V**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 5**

1. SKPD terkait berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati;
2. Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri terkait;
3. Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan menjadi acuan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis dalam penerapan dan pencapaian SPM oleh Bupati dan Kementerian terkait.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 6**

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerja sama antar daerah;

**Pasal 7**

1. Bappeda melaksanakan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bappeda menyampaikan laporan pengawasan pencapaian kinerja pelayanan kepada Bupati sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.
2. Peraturan Bupati akan di evaluasi dan direvisi minimal 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diur

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Da  
Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 23 November 2012

| PARAF KOORDINASI |       |
|------------------|-------|
| INSTANSI         | PARAF |
|                  |       |
|                  |       |
| 3.               | f     |
| 4. KABAG HUKUM   | R     |
| 5.               | f     |
| 3.               | x     |

**BUPATI KONAWE SELATAN**



**H. IMRAN**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 27 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**H. SARDJUN MOKKE**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE  
SELATAN TAHUN 2012 NOMOR:

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR :**  
**TANGGAL :**  
**TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) LINGKUP**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

| No | Bidang    | Jenis Pelayanan Dasar   | Standar Pelayanan Minimal   |                  | Batas Waktu Pencapaian (Tahun) | Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab |
|----|-----------|---|---|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|    |           |   | Indikator   | Nilai            |                                |                                       |
| 1  | 2         | 3   | 4   | 5                | 6                              | 7                                     |
| 1. | Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Dasar   | 1. Cakupan kunjungan Ibu hamil  | 95 %             | 2015                           | Dinas Kesehatan                       |
|    |           |   | 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani  | 80%              | 2015                           |                                       |
|    |           |   | 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan              | 90%              | 2015                           |                                       |
|    |           |   | 4. Cakupan pelayanan nifas  | 90%              | 2015                           |                                       |
|    |           |   | 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani  | 80%              | 2010                           |                                       |
|    |           |   | 6. Cakupan kunjungan bayi,  | 90%              | 2010                           |                                       |
|    |           |   | 7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI   | 100%             | 2010                           |                                       |
|    |           |   | 8. Cakupan pelayanan anak balita  | 90%              | 2010                           |                                       |
|    |           |   | 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin                 | 100 %            | 2010                           |                                       |
|    |           |   | 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan  | 100%             | 2010                           |                                       |
|    |           |   | 11. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat  | 100 %            | 2010                           |                                       |
|    |           |   | 12. Cakupan peserta KB aktif  | 70%              | 2010                           |                                       |
|    |           |   | 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit  | 100%             | 2010                           |                                       |
|    |           |   | 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin   | 100%             | 2015.                          |                                       |
| 2. | Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Rujukan   | 1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin   | 100%             | 2015                           | Dinas Kesehatan                       |
|    |           |   | 2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota | 100%             | 2015                           |                                       |
| 3. | Kesehatan | Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi                          | < 24 jam<br>100% | 2015                           | -Dinas Kesehatan                      |
| 4. | Kesehatan | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat                         | Cakupan Desa Siaga Aktif  | 80%              | 2015                           | -                                     |

| No  | Bidang                    | Jenis Pelayanan Dasar   | Standar Pelayanan Minimal   |       | Batas Waktu Pen-<br>capaian<br>(Tahun) | Satuan Kerja/<br>Lembaga<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|---------------------------|---|---|-------|--|---|
|     |                           |   | Indikator   | Nilai |  |   |
| 1   | 2                         | 3   | 4   | 5     | 6                                      | 7   |
| 5.  | Lingkungan Hidup          | pelayanan informasi status mutu air   | persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya                     | 100%; | 2013                                   | Badan Lingkungan Hidup                          |
| 6.  | Lingkungan Hidup          | pelayanan informasi status mutu udara ambien  | persentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya                                 | 100%; | 2013                                   | Badan Lingkungan Hidup                          |
| 7.  | Lingkungan Hidup          | pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup  | persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;                | 100%; | 2013                                   | Badan Lingkungan Hidup                          |
| 8.  | Lingkungan Hidup          | pelayanan pencegahan pencemaran air   | persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air                           | 100%; | 2013                                   | Badan Lingkungan Hidup                          |
| 9.  | Lingkungan Hidup          | pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak  | persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran udara | 100%; | 2013                                   | Badan Lingkungan Hidup                          |
| 10. | Lingkungan Hidup          | pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa                                 | persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya                     | 100%; | 2013                                   | Badan Lingkungan Hidup                          |
| 11. | Lingkungan Hidup          | pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. | persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti                 | 90%;  | 2013                                   | Badan Lingkungan Hidup                          |
| 12. | Pemerintahan Dalam Negeri | Pelayanan Dokumen Kependudukan  | 1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)  | 100%; | 2011                                   | Dinas Dukcapil                                  |
|     |                           |   | 2. cakupan penerbitan akta kelahiran  | 100%; | 2011                                   | Dinas Dukcapil                                  |

| No  | Bidang                    | Jenis Pelayanan Dasar  | Standar Pelayanan Minimal  |       | Batas Waktu Pen-capaian (Tahun) | Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab |
|-----|---------------------------|--|--|-------|---------------------------------|--|
|     |                           |  | Indikator  | Nilai |                                 |  |
| 1   | 2                         | 3  | 4  | 5     | 6                               | 7                                      |
| 13. | Pemerintahan Dalam Negeri | Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat   | 3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota   | 50%;  | 2015                            | Badan Kesbang                          |
|     |                           |  | 4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota   | 70%;  |                                 |  |
| 14. | Pemerintahan Dalam Negeri | Penanggulangan Bencana Kebakaran   | 5. cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota  | -     | -                               |  |
|     |                           |  | 6. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)   | -     | -                               |  |
| 15. | Sosial                    | Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial a. pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala kabupaten/kota. | Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar.  | 80 %  | 2008-2015                       | Dinas Sosial                           |
|     |                           | b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota.  | Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. | 60%   |                                 |  |
| 16. | Sosial                    | Penyediaan sarana dan prasarana sosial c. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota;                                   | Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.   | 80%   | 2008-2015                       | Dinas Sosial                           |
|     |                           | d. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota   | Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.                         | 60%   |                                 |  |
| 17. | Sosial                    | Penanggula-ngan korban bencana c. bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota  | Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang Menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.   | 80%   | 2008-2015                       | Dinas Sosial                           |

| No  | Bidang   | Jenis Pelayanan Dasar  | Standar Pelayanan Minimal  |                             | Batas Waktu Pen-<br>capaian<br>(Tahun) | Satuan Kerja/<br>Lembaga<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|--|--|--|-----------------------------|--|---|
|     |  |  | Indikator  | Nilai                       |  |   |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                           | 6                                      | 7   |
|     |  | d. evakuasi korban bencana skala kabupaten/kota.   | Persentase (%)korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.             | 80%                         | 2008-2015                              | Badan Penanggu-<br>Langan<br>Bencana-<br>Daerah |
| 18. | Sosial   | Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial<br>- penyelenggaraan jaminan sosial<br>Skala kabupaten/kota. | Persentase (%)penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.                     | 40%                         | 2008-2015                              | Dinas Sosial                                    |
| 19. | Perumahan Rakyat   | Rumah Layak Huni dan Terjangkau  | 1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni   | 100 %                       | 2009 - 2025                            | Dinas PU,<br>Dinas Sosial                       |
|     |  |  | 2.Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau   | 70 %                        | 2009 - 2025                            | Dinas PU,<br>Dinas Sosial                       |
| 20. | Perumahan Rakyat   | Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)  | 3.Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU  | 100%                        | 2009 - 2025                            | Dinas PU,<br>Dinas Sosial                       |
| 21. | Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak  | a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 100%                        | 2014                                   | BP2KB   |
| 22. | Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak                  | Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan   | b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di                        | 100% dari sasa-<br>ran pro- | 2014                                   | BP2KB   |

| No  | Bidang   | Jenis Pelayanan Dasar  | Standar Pelayanan Minimal  |       | Batas Waktu Pen-<br>capaian<br>(Tahun) | Satuan Kerja/<br>Lembaga<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|--|--|--|-------|--|---|
|     |  |  | Indikator  | Nilai |  |   |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5     | 6                                      | 7   |
|     | Korban Kekerasan   |  | Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit   | gram  |  |   |
| 23. | Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan   | c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | 75%   | 2014                                   | BP2KB   |
|     |  |  | d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu       | 75%   | 2014                                   | BP2KB, Bag. KESRA                               |
| 24. | Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                 | e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                               | 80%   | 2014                                   | BP2KB, Kejaksaan Pengadilan                     |
|     |  |  | f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum  | 50%   | 2014                                   | BP2KB   |
| 25. | Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan                           | g. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan   | 50%   | 2014                                   | BP2KB   |
|     |  |  | h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan   | 100%  | 2014                                   | BP2KB   |
| 26. | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera                | Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) | 1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun  | 3,5%  | 2014                                   | BP2KB, Dinas Kesehatan                          |
|     |  |  | 2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif  | 65%   | 2014                                   | BP2KB, Dinas Kesehatan                          |
|     |  |  | 3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)  | 5,0%  | 2014                                   | BP2KB, Dinas Kesehatan                          |
|     |  |  | 4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB   | 70%   | 2014                                   | BP2KB, Dinas Kesehatan                          |
|     |  |  | 5. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri  | 10%   | 2014                                   | BP2KB, Dinas Kesehatan                          |

| No  | Bidang                                    | Jenis Pelayanan Dasar                          | Standar Pelayanan Minimal  |   | Batas Waktu Pen-capaian (Tahun) | Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab |
|-----|---|--|--|---|---------------------------------|--|
|     |   |  | Indikator  | Nilai                                       |                                 |  |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                               | 7                                      |
|     |   |  | 6. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB   | 1 PKB/ PLKB untuk setiap 2 desa/ kelura han | 2014                            | BP2KB, Dinas Kesehatan                 |
|     |   |  | 7. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)  | setiap desa/ kelura han 1 PPK-BD            | 2014                            | BP2KB, Dinas Kesehatan                 |
| 27. | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | Penyediaan alat dan obat kontrasepsi           | Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat  | 30% per tahun                               | -                               | BP2KB, Dinas Kesehatan                 |
| 28. | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | Penyediaan Informasi Data Mikro                | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa  | 100%  | 2014                            | BP2KB, Dinas Kesehatan                 |
| 29. | Pendidikan Dasar                          | Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota | 1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil  | 100%  | 2015                            | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga   |
| 30. | Pendidikan Dasar                          | Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota | 2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis | 100%  | 2015                            | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga   |
| 31. | Pendidikan Dasar                          | Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota | 3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup  | 100%  | 2015                            | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga   |

| No  | Bidang           | Jenis Pelayanan Dasar                          | Standar Pelayanan Minimal   |       | Batas Waktu Pen-<br>capaian<br>(Tahun) | Satuan Kerja/<br>Lembaga<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|------------------|--|---|-------|--|---|
|     |                  |  | Indikator   | Nilai |  |   |
| 1   | 2                | 3  | 4   | 5     | 6                                      | 7   |
|     |                  |  | minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;  |       |  |   |
| 32. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota | 4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 33. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota | 5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;  | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 34. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota | 6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;   | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 35. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota | 7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;  | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 36. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota | 8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.               | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |

| No  | Bidang           | Jenis Pelayanan Dasar                             | Standar Pelayanan Minimal  |       | Batas Waktu Pen-<br>capaian<br>(Tahun) | Satuan Kerja/<br>Lembaga<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|------------------|---|--|-------|--|---|
|     |                  |   | Indikator  | Nilai |  |   |
| 1   | 2                | 3   | 4  | 5     | 6                                      | 7   |
| 37. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota    | 9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 38. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota    | 10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;  | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 39. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota    | 11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;  | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 40. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota    | 12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;   | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 41. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota    | 13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan  | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 42. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota    | 14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.  | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 43. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan | 1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelengkapannya oleh  | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |

| No  | Bidang           | Jenis Pelayanan Dasar                             | Standar Pelayanan Minimal   |       | Batas Waktu Pencapaian (Tahun) | Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab |
|-----|------------------|---|---|-------|--------------------------------|---------------------------------------|
|     |                  |   | Indikator   | Nilai |                                |                                       |
| 1   | 2                | 3   | 4   | 5     | 6                              | 7                                     |
|     |                  |   | Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;  |       |                                |                                       |
| 44. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan | 2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;   | 100%  | 2015                           | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  |
| 45. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan | 3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;                | 100%  | 2015                           | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  |
| 46. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan | 4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;  | 100%  | 2015                           | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  |
| 47. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan | 5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; | 100%  | 2015                           | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  |
| 48. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan | 6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :   | 100%  | 2015                           | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  |

| No  | Bidang           | Jenis Pelayanan Dasar                             | Standar Pelayanan Minimal  |       | Batas Waktu Pen-<br>capaian<br>(Tahun) | Satuan Kerja/<br>Lembaga<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|------------------|---|--|-------|--|---|
|     |                  |   | Indikator  | Nilai |  |   |
| 1   | 2                | 3   | 4  | 5     | 6                                      | 7   |
|     |                  |   | a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;<br>b) Kelas III : 24 jam per minggu;<br>c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau<br>d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;  |       |  |   |
| 49. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan | 7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;  | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 50. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan | 8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;  | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 51. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan | 9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;   | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 52. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan | 10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;  | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 53. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan | 11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik; | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 54. | Pendidikan Dasar | Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan | 12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas  | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |

| No  | Bidang                            | Jenis Pelayanan Dasar   | Standar Pelayanan Minimal  |       | Batas Waktu Pen-<br>capaian<br>(Tahun) | Satuan Kerja/<br>Lembaga<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|-----------------------------------|---|--|-------|--|---|
|     |                                   |   | Indikator  | Nilai |  |   |
| 1   | 2                                 | 3   | 4  | 5     | 6                                      | 7   |
|     |                                   |   | (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan |       |  |   |
| 55. | Pendidikan Dasar                  | Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan                               | 13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).  | 100%  | 2015                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga            |
| 56. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | a. Sumber Daya Air<br>Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat | 1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.  | 100%  | 2014                                   | Dinas PU  |
|     |                                   |   | 2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.  | 70%   | 2014                                   | Dinas PU  |
| 57. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | b. Jalan<br>1. Jaringan<br>a) Aksesibilitas                                     | 3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.   | 100%  | 2014                                   | Dinas PU  |
|     |                                   | b) Mobilitas  | 4. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.  | 100%  | 2014                                   | Dinas PU  |
|     |                                   | c) Keselamatan  | 5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.   | 60 %  | 2014                                   | Dinas PU  |
|     |                                   | 2. Ruas<br>a) Kondisi jalan   | 6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.   | 60 %  | 2014                                   | Dinas PU  |

| No   | Bidang                            | Jenis Pelayanan Dasar   | Standar Pelayanan Minimal  |       | Batas Waktu Pen-<br>capaian<br>(Tahun) | Satuan Kerja/<br>Lembaga<br>Penanggung<br>Jawab |
|------|-----------------------------------|---|--|-------|--|---|
|      |                                   |   | Indikator  | Nilai |  |   |
| 1    | 2                                 | 3   | 4  | 5     | 6                                      | 7   |
| 58.  | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | b) Kecepatan  | 7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.   | 60 %  | 2014                                   | Dinas PU  |
|      |                                   | c. Air Minum  | 8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 liter/orang/hari |       | 2014                                   | Dinas PU  |
|      |                                   | Cluster Pelayanan   |  |       |  |   |
|      |                                   | Sangat buruk  |  | 40%   |  |   |
|      |                                   | Buruk   |  | 50%   |  |   |
|      |                                   | Sedang  |  | 70%   |  |   |
| Baik | 80%                               |   |  |       |  |   |
|      | Sangat Baik                       | 100%  |  |       |  |   |
| 59.  | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | d. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) | 9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.  | 60 %  | 2014                                   | Dinas PU  |
|      |                                   | 1. Air limbah permukiman  | 10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.  | 5%    | 2014                                   | Dinas PU  |
|      |                                   | 2. Pengelolaan sampah   | 11. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.   | 20 %  | 2014                                   | Dinas PU  |
|      |                                   |   | 12. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.   | 70 %  | 2014                                   | Dinas PU  |
|      |                                   | 3. Drainase   | 13. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.                | 50 %  | 2014                                   | Dinas PU  |
|      |                                   |   |  |       |  |   |
| 60.  | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | e. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan                                  | 14. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.   | 10 %  | 2014                                   | Dinas PU  |
| 61.  | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | f. Penataan Bangunan dan Lingkungan                                       | 15. Bangunan (IMB) Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.  | 100%  | 2014                                   | Dinas PU  |
|      |                                   | 1. Izin Mendirikan<br>2. Harga Standar                                    | 16. Bangunan Gedung Negara (HSBGN)<br>Tersedianya pedoman  | 100%  | 2014                                   | Dinas PU  |

| No  | Bidang   | Jenis Pelayanan Dasar   | Standar Pelayanan Minimal  |           | Batas Waktu Pen-<br>capaian<br>(Tahun)           | Satuan Kerja/<br>Lembaga<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|--|---|--|-----------|--|---|
|     |  |   | Indikator  | Nilai     |  |   |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5         | 6  | 7   |
| 62. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang              | g. Jasa Konstruksi<br>1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)                              | Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.<br>17. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.  | 100%      | 2014   | Dinas PU  |
|     |  | 2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi   | 18. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun.   | 100%      | 2014   | Dinas PU  |
| 63. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang              | h. Penataan Ruang<br>1. Informasi Penataan Ruang  | 19. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.  | 100%      | 2014<br>(Kabupa-<br>en/kota<br>dan keca-<br>aan) | Dinas PU, Bappeda                               |
|     |  |   |  | 90%       | 2014<br>(kelura-<br>han)                         |   |
|     |  | 2. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR                               | 20. Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. | 100%      | 2014   | Dinas PU  |
|     |  | 3. Izin Pemanfaatan Ruang   | 21. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.   | 100%      | 2014   | Dinas PU  |
|     |  | 4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang   | 22. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.   | 100%      | 2014<br>(Kabupa-<br>en/kota<br>dan keca-<br>aan) | Dinas PU  |
|     | 5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik | 23. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. | 25%  | 2010-2014 | Dinas PU   |   |
|     |  |   |  | 75%       | 2016   | Disnakertrans                                   |

| No  | Bidang               | Jenis Pelayanan Dasar   | Standar Pelayanan Minimal  |       | Batas Waktu Pen-<br>capaian<br>(Tahun) | Satuan Kerja/<br>Lembaga<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|----------------------|---|--|-------|--|---|
|     |                      |   | Indikator  | Nilai |  |   |
| 1   | 2                    | 3   | 4  | 5     | 6                                      | 7   |
|     | kerjaan              | Pelatihan Kerja   | 1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi |       |  |   |
|     |                      |   | 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 60%   | 2016                                   | Disnakertrans                                   |
|     |                      |   | 3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan       | 60%   | 2016                                   | Disnakertrans                                   |
| 65. | Ketenaga-<br>kerjaan | Pelayanan<br>Penempatan<br>Tenaga Kerja                             | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan                  | 70%   | 2016                                   | Disnakertrans                                   |
| 66. | Ketenaga-<br>kerjaan | Pelayanan<br>Penyelesaian<br>Perselisihan<br>Hubungan<br>Industrial | Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)         | 50%   | 2016                                   | Disnakertrans                                   |
| 67. | Ketenaga-<br>kerjaan | Pelayanan<br>Kepesertaan<br>Jamsostek                               | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek           | 50%   | 2016                                   | Disnakertrans                                   |
| 68. | Ketenaga-<br>kerjaan | Pelayanan<br>Pengawasan<br>Ketenagakerjaan                          | 1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan                                      | 45%   | 2016                                   | Disnakertrans                                   |
|     |                      |   | 2. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan                           | 50%   | 2016                                   | Disnakertrans                                   |
| 69. | Ketahanan<br>Pangan  | a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan                                 | 1. Ketersediaan energi dan protein perkapita                           | 90%   | 2015                                   | Badan Ketahanan Pangan                          |
|     |                      |   | 2. Penguatan cadangan pangan   | 60%   | 2015                                   | Badan Ketahanan Pangan                          |
| 70. | Ketahanan<br>Pangan  | b. Distribusi dan Akses Pangan                                      | 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah    | 90%   | 2015                                   | Badan Ketahanan Pangan                          |
|     |                      |   | 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan                                 | 90%   | 2015                                   | Badan Ketahanan Pangan                          |

| No  | Bidang                      | Jenis Pelayanan Dasar  | Standar Pelayanan Minimal   |                         | Batas Waktu Pen-<br>capaian<br>(Tahun) | Satuan Kerja/<br>Lembaga<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|-----------------------------|--|---|-------------------------|--|---|
|     |                             |  | Indikator   | Nilai                   |  |   |
| 1   | 2                           | 3  | 4   | 5                       | 6                                      | 7   |
| 71. | Ketahanan Pangan            | c. Penganeka-<br>ragaman dan<br>Keamanan<br>Pangan                         | 1. Pencapaian skor Pola<br>Pangan Harapan (PPH)   | 90%                     | 2015                                   | Badan<br>Ketahanan<br>Pangan                    |
|     |                             |  | 2. Pengawasan dan<br>pembinaan kewan-<br>amanan<br>pangan   | 80%                     | 2015                                   |   |
| 72. | Ketahanan Pangan            | d. Penanganan<br>Kerawanan<br>Pangan                                       | Penanganan daerah rawan<br>pangan   | 60%                     | 2015                                   | Badan<br>Ketahanan<br>Pangan                    |
| 73. | Komunikasi dan<br>Informasi | Pelaksanaan<br>Diseminasi<br>Informasi<br>Nasional                         | 1. Pelaksanaan diseminasi<br>dan pendistribusian<br>informasi nasional melalui:   | -                       | -                                      | Dishub Kominfo                                  |
|     |                             |  | a) media massa seperti<br>majalah, radio, dan televisi;   | 12 kali<br>per<br>tahun | 2014                                   |   |
|     |                             |  | b) media baru seperti<br>website (media online);  | Setiap<br>hari          | 2014                                   |   |
|     |                             |  | c) media tradisional seperti<br>pertunjukan rakyat;   | 12 kali<br>per<br>tahun | 2014                                   |   |
|     |                             |  | d) media interpersonal<br>seperti sarasehan,<br>ceramah/diskusi, dan<br>lokakarya; dan/atau<br>e) media luar ruang seperti<br>media buletin, leaflet,<br>booklet, brosur, spanduk,<br>dan baliho  | 12 kali<br>per<br>tahun | 2014                                   |   |
| 74. | Komunikasi dan<br>Informasi | Pengembangan<br>dan<br>Pemberdayaan<br>Kelompok<br>Informasi<br>Masyarakat | 2. Cakupan pengembangan<br>dan pemberdayaan<br>Kelompok Informasi<br>Masyarakat di Tingkat<br>Kecamatan   | 50%                     | 2014                                   | Dishub Kominfo                                  |
| 75. | Kesenian                    | Perlindungan,<br>Pengembangan<br>dan Pemanfaatan<br>Bidang Kesenian        | a. Cakupan Kajian seni<br>Kegiatan yang bersifat kajian<br>adalah:<br>1. seminar<br>2. srasehan<br>3. diskusi<br>4. bengkel seni<br>(workshop)<br>5. penyerapan<br>narasumber<br>6. studi kepustakaan<br>7. penggalan<br>8. eksperimentasi<br>9. rekonstruksi<br>10. revitalisasi<br>11. konservasi<br>12. strudi banding<br>13. inventarisasi<br>14. dokumentasi | 100                     | 2014                                   | Dinas<br>Kebudayaan<br>dan<br>Pariwisata        |

| No  | Bidang   | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal  |       | Batas Waktu Pen-<br>capaian<br>(Tahun) | Satuan Kerja/<br>Lembaga<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|----------|-----------------------|--|-------|--|---|
|     |          |                       | Indikator  | Nilai |  |   |
| 1   | 2        | 3                     | 4  | 5     | 6                                      | 7   |
|     |          |                       | <p>15. pengemasan bahan kajian</p> <p>Kabupaten/kota minimal melaksanakan 50% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni.</p> <p>b. Cakupan Fasilitas seni Jenis-jenis fasilitas dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyuluhan substansial maupun teknis</li> <li>2. pemberian bantuan</li> <li>3. bimbingan organisasi</li> <li>4. kaderisasi</li> <li>5. promosi</li> <li>6. penerbitan dan pendokumentasian</li> <li>7. kritik seni</li> </ol> <p>kabupaten/kota minimal melaksanakan 30% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan fasilitas seni.</p> <p>c. Cakupan gelar seni wujud gelar seni antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pagelaran</li> <li>2. pameran</li> <li>3. festival</li> <li>4. lomba</li> </ol> <p>kabupaten/kota minimal melaksanakan 75% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan gelar seni.</p> <p>d. Misi kesenian pemerintah kabupaten/kota wajib mengadakan misi kesenian antar-daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi dan promosi kesenian daerahnya keluar daerah. kabupaten/kota melaksanakan 100% cakupan misi kesenian.</p> | 100   | 2014                                   | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                 |
|     |          |                       | <p>a. Cakupan sumber daya manusia kesenian Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian</p>  | 100   | 2014                                   | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                 |
| 76. | Kesenian | Sarana dan prasarana  | <p>a. Cakupan sumber daya manusia kesenian Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian</p>  | 100   | 2014                                   | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                 |

| No | Bidang | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal  |       | Batas Waktu Pen-<br>capaian<br>(Tahun) | Satuan Kerja/<br>Lembaga<br>Penanggung<br>Jawab |
|----|--------|-----------------------|--|-------|--|---|
|    |        |                       | Indikator  | Nilai |  |   |
| 1  | 2      | 3                     | 4  | 5     | 6                                      | 7   |
|    |        |                       | sebagai berikut:<br>1. sarjana seni<br>2. pakar seni<br>3. pamong budaya<br>4. seniman/budayawan<br>5. kritikus<br>6. insane media massa<br>7. pengusaha<br>8. penyanggah dana<br>kabupaten/kota<br>menyediakan minimal 25%<br>dari cakupan Sumber Daya<br>Manusia Kesenian.   |       |  |   |
|    |        |                       | b. cakupan tempat 100%<br>Pemerintah provinsi dan<br>kabupaten/kota<br>berkewajiban menyediakan<br>minimal:<br>1. Tempat untuk<br>menggelar seni<br>pertunjukan dan alat<br>untuk pameran<br>2. Tempat memasarkan<br>karya seni untuk<br>mengembangkan<br>industri budaya.<br>Kabupaten/kota<br>menyediakan minimal satu<br>tempat yang mudah dicapai<br>oleh masyarakat, dapat<br>berupa gedung kesenian<br>atau fasilitas-fasilitas yang<br>memungkinkan dan satu<br>buah tempat untuk<br>memasarkan karya seni. | 100   | 2014                                   | Dinas<br>Kebudayaan<br>dan<br>Pariwisata        |
|    |        |                       | c. Cakupan organisasi<br>Pemerintah kabupaten/kota<br>membentuk:<br>1. organisasi struktural<br>yang menangani<br>kesenian<br>2. lembaga/dewan<br>kesenian<br>3. khusus pemerintah<br>provinsi membentuk<br>Taman Budaya sebagai<br>UPT yang menangani<br>kesenian.<br>Kabupaten/kota minimal<br>melaksanakan 34% dari<br>cakupan organisasi.  | 100   | 2014                                   | Dinas<br>Kebudayaan<br>dan<br>Pariwisata        |

GRAF KOORDINASI  
 INSTANSI                      PARAF  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

